

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ardimanto, dkk, 2012, *Oase Gagasan Papua Damai*, Jakarta: Imparsial.
- Aslim Rasyad, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Banu, Syahar, 2022, *Disertasi: “Rekonstruksi Regulasi BPJS Tarif Pada Tipe-Tipe Rumah Sakit Yang Berbasis Nilai Keadilan”*, Semarang: UNISSULA.
- Bentham, Jeremy, 2001, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Ontario: Batoche Books Kitchener.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2001, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cranston, Ross, 1985, *Legal Foundations of the Welfare State*, London: Weldenfeld and Nicolson.
- Effendi, A. Masyhur, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia utama.
- Farkhani, dkk. 2018, *Filsafat Hukum ; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Solo: Kafilah Publishing.
- Garner, A, 1990, *Black's Law Dictionary, Seventh Edlflon, St Paul*, Minn: West Group,
- H.R, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hamka, 1984, *Islam Revolusi Ideolog dan Keadilan Sosial*, Jakarta: Pustaka Janji Mas.
- Hasibuan, Albert dan Sutomo, *Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan*, Jakarta: PT Sinar Harapan Suara Pembaharuan,
- Huda, Miftachul, 2010, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ilmar, Aminuddin, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta: Kencana.

Indonesia Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2013, *Buku Pegangan Sosialisasi: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Iver, Mac, 1050, *The Modern State*, Oxford: University Press, London.

John Pieris, 2007, *Pembatasan Konstitusional Presiden RI Edisi I*, Pelangi Cendikia, Jakarta.

Kurnia, Tito Slamet, 2007 *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Bandung: P.T Alumni.

Mangunhardjana, A, 1999, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, Yogyakarta: Kanisius.

Marbun, S.F, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII Press.

Marzuki, Peter Muhammad, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.

Mustafa, Bachsan, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Alumni.

Nugraha, Safri, 2004, *Privatisation of State Enterprises In The 20th Century A Step Forwards Or Backwards*, Jakarta: Fakultas Hukum UI.

Ramadhan, Abduri Chair, 2006, *Perkembangan Filsafat Hukum*, Jakarta: BP Iblam.

Ramadhan, Muhammad, 2021, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Ridwan, Juniarso, dan Ahmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Cet. I, Nuansa.

Siringoringo, Hotniar, 2005, *Pemograman Linier: Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soekanto, Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sukrino, Didik, 2013, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Malang: Setara Press.

Suharto, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama.

Syafie, Inu Kencana, 1994, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Tampubolon, Manotar, 2023, *Metode Penelitian*, Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi.

Tanya , Bernard L dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta publishing.

Tjandra, W. Riawan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.

Widodo, Joko, 2001, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia.

Winarno, Budi. 2014, *Kebijakan publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Rudy, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Bandar Lampung: Indepth Publishing.

Teubnei, Gunther, 1986, *Dilemmas of Law in Welfare State*, Berlin-New York: Walter de Gruyter.

Wahyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Winardi, 1999, *Pengantar Manajemen Penjualan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

B. JURNAL

Ardinata Mikho, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Prspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ham*, Vol. 11, No. 2 (Agustus 2020).

Ary Dean Amri, “Persepsi Masyarakat Terhadap Tingkat Kepuasan Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Jambi Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariaah*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2023).

Aria Yuditia, Yusup Hidayat, & Supradi Achmad, “Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Berdasarkan UndangUndang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional”. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, (Januari 2021).

Ayu Ningrum Septia, “Respon Kepuasan Pasien Pengguna Bpjs Kesehatan Terhadap Pelayanan Kesehatan Dipuskesmas Pekanbaru,” *Jom Fisip*, Vol. 2, No. 2, (Oktober 2015).

Aqris Syaid dan Taufiqurohman Syahuri, “Pemberlakuan Inpres No.1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Menyehatkan BPJS Kesehatan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 1, (2023).

Cindy Meyloni Gabriela Bedu dkk, “Kepesertaan Bpjs Kesehatan Sebagai Syarat Wajib Bagi Pendaftaran/Peralihan Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Vol. 18, No. 1, (April 2023).

Cindy Pertiwi, “Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Pengguna BPJS Kesehatan,” *Journal of Cahaya Mandalika*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2020).

Cipto Rizqi Agung Saputro dan Fenny Fathiyah, “Universal Health Coverage: Internasionalisasi Norma di Indonesia,” *Jurnal Jaminan Kesehata Nasional*, Vol.2 No. 2, (Novemer 2022).

Dedi Afandi, “Hak Atas Kesehatan dalam Perspektif HAM”, *Jurnal Ilmu Kedokteran*, Vol. 3 No.1, (Maret 2008).

Elviandri, dkk, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 31, No. 2, (Juni 2019).

Erna dkk, “sImplementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin” *Jurnal Cendikia Jaya*, Vol. 2, No.2, (Juli 2020).

Fernando Silalahi, “Analisis Yuridis Terhadap Sistem Kameral Majelis Permusyawaratan Rakyat Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakatn*, Vol. 5, No. 1, (April 2019).

Fernando Silalahi, “Mekanisme Penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 Tntang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Kaidah Kegntingan Yang Memaksa”, *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakatn*, Vol. 5, No. 2, (Agustus 2019),

Fherival Sri Isriawaty, “Tanggung jawab Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.3, No.2 (2015).

Hanifah Azwar, “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik (Studi Kasus BPJS Kesehatan di Kawasan Industri Cikarang),” *Sosio e-Kons*, Vol. 11, No. 3 (Desember 2019).

Honing Sanny, John Pieris, Daniel, “ Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Pancasila di Indonesia”, *Jurnal Hukum: Hukum Untung Mengatur dan Melindungi Masyrakat*, Vol. 7, No. 2, (Februari 2021).

Hutauruk, A. H, “Filosofi Negara Kesejahteraan Yang Dirumuskan Dalam Pancasila Dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”, *SOL JUSTISIO: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3 No.1, (Juni 2021).

I Nyoman Dharma Wiasa dan I Nyoman Budiana, “Implementasi Perindungan Konsumen Peserta BPJS Dalam Pelayanan Kesehatan di RSUP Sangalah Denpasar,” *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2, No. 2, (September 2019),

Indar, “Fungsi Hukum Dalam Penyelenggara Pelayanan Kesehatan, *Jurnal AKK*, Vol 2 No. 1, (Januari 2013).

Isnaeni Ayuningtias dkk, “Analisis Kepuasan Penggunaan Asuransi Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) dan Perbandingannya dengan Asuransi Swasta di Kabupaten Kuningan,” *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*, Vol 1. No.1, (Juni 2024).

Ita Listiyana dan Eunike Raffy Rustiana, “Analisis Kepuasan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pengguna Bpjs Kesehatan Di Kota Semarang,” *Unnes Journal Public Health*, Vol. 3, No. 1 (Januari 2017).

Kadek Lin Listyana Dewi, dkk, “Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Bpjs Kesehatan Di Kota Singaraja,” *Bisma: Jurnal*, Vol. 5, No. 2 (Oktober 2019).

Khariza HA, “Program Jaminan Kesehatan Nasional: Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Keerhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, *Jurnal Keijakan dan Managemen Publik*, Vol. 3, No. 1. (Januari 2015).

Kornelus Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilah*, Vol.7, No. 1, (Juni-2020).

M.Hartman, “*National health care spending in 2018: Growth driven by accelerations in medicare and private insurance spending. Health Affairs*”, Vol. 39, No.1, (Desember 2019).

Marilang, “Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, (Juni 2012).

Marius Air, John Pieris, Nelson Simanjuntak, “Kajian Hukum Terhadap Implemntasi Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat (Studi Kasus UU N0. 21 Tahun 2003 Tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat)”, *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 7, No. 2, (Februari 2021).

Marsudi Dedi Putra, “Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Dalam Perspektif Pancasila”, Vol. 23, No. 2, (September 2021).

Mundiharno, Peta Jalan Menuju Universal Coverage Jaminana Kesehatan (*Road Map To A Universal Health Converage*), *Jurnal Legislasi Indonesia (Indonesian Journal of Legislation)*, Vol. 9 No. 2 , (Juli 2012).

Muhammad Soleh Pulungan, “Keijakan Hukum Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kalimantan Timur,” *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 24, (Agustus 2016).

Nurwidya Kusma Wardhani, dkk, “Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2024).

Otong Rosadi, “Hukum Kodrat, Pancasila dan asas hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*”, Vol. 10, No. 3, (September 2010), h. 277-284.

Praysi Nataly Rattu, dkk, Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa), *Jurnal Governance*, Vol. 2, No. 1, (2022).

Retno Kus Setyowati, “ Sistem Jaminan Kesehatan yang Memenuhi Hak-Hak Kepesertaan,” *Justice Voice*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2022).

Rismawan Rifki, “Kebijakan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Pemerintah Kota Palu Di Era Jaminan Kesehatan Nasional”, *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, Vol 07, No.4, (Desemer 2018).

Robert Libra & Muhammad Fauzan, “Penerapan Konsep Welfare State Dalam Memprioritaskan Pelayanan dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2023).

Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N.A.M.Sihombing, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 2, (Juni 2012).

Ruli Agustin, Taufiqurrohman Syahuri, ”Implementasi Undang-Undang Kesehatan: Implikasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Prspektif Tenaga Kesehatan di Indonesia”, *BACARITA Law Journal*”, Vol. 4, No. 2, (April 2024).

Suharto Edi, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Walfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 2, (Juni 2019).

Sulistiyani Dewi, “Perbandingan Premi Asuransi Kesehatan Peserta BPJS Badan Usaha Dengan Asuransi Kesehatan Swasta,” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, Vol. 16, No. 1 (Juli 2015).

Qonita Aghina dkk, Pengaruh Pola Sebaran Sarana dan Prasarana Kesehatan Terhadap Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tegal Tahun 2016, *Geo-Image Journal*, Vol.7, No.1, (Mei 2018).

Valen Nainggolan dan Tundjung Herning Sitabuana, “Jaminan Kesehatan Bagi Rakyat Indonesia Menurut Hukum Kesehatan” *Sibatik Journal*, Vol. 1, No. 6, (Mei 2022).

Widiya Wati, “Analisis Kualitas Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit X Kabupaten Kerinci”, *Jurnal Kesehatan Andalas*, Vol. 8, No. 2, (2019).

Yuluastuti Hilda, Moh Jawahir, “ Analisis Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Layanan Kesehatan Mobile Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masuarakat Langit Biru*, Vol.4 No. 01, (Maret 2023).

Zahry Vandawati dkk, “Aspek Hukum Kartu Indonesia Sehat”, *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol 31 No. 3, (September-Desember 2016).

C. ARTIKEL ILMIAH

Artadi, Ibnu, “Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan”, *Artikel Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, (Oktober 2006), Universitas 17 Agustus 1945, Semarang.

Darmalaksana, Wahyudin, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan,” *Pre-print Digital Library: UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (2020).

Irianto, Sulistyowati, “Pendidikan Hukum untuk Indonesia Masa Depan: Suatu Catatan Kritis,” *Orasi Ilmiah: Disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Dies Natalis Fakultas Hukum UGM ke-74* (2020).

Lutfi, Mochtar, “Hermeneutika: Pemahaman Konseptual dan Metodologis” *Artikel ditulis di Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, Surabaya, (Juli-September 2007)

Sari, Dwi Yunita, dkk, *Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Artikel , Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

D. KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, Jakarta: Balai Pustaka.

E. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018. Tentang Jaminan Kesehatan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

F. DOKUMEN

Kabupaten Manokwari Selatan Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2024.

Kementrian Kesehatan, 2003, *Buku Panduan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Populasi Kunci*, Kementerian Kesehatan.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Pegangan Sosialisasi: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional* (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia).

BPJS Kesehatan, *Booklet Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2024*, 2004, h. 23

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan, 2022, *Kajian Peningkatan Pelayanan Kesehatan Berkualitas Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Papua dan Papua Barat*, Jakarta: Kementerian PPN/Bapennas.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari Selatan, 2024, Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka 2023, Manokwari Selatan: BPS Kabupaten Manokwari.

G. WEBSITE INTERNET

“Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)” <https://promkes.kemkes.go.id>

“Wujudkan Lebih Dari 95 % Penduduk Terdaftar JKN Pemda Manowari Selatan”
” <https://klikpapua.com/papua-barat/manokwariselatan/wujudkan-lebih-dari-95-penduduk-terdaftar-jkn-pemda-mansel-terima-uhc-award.html>

“Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia”
<https://businesslaw.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>

“Otonomi Daerah Landasarn Hukum Asas dan Pemda ”
<https://paulusmtangke.wordpress.com/otonomi-daerah-landasan-hukum-asas-dan-pemda/>

